



Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia-Pasifik

Poltak Partogi Nainggolan^{*)}

Abstrak

Perubahan fokus kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) telah dilakukan. Asia Pasifik diberikan prioritas tertinggi dalam persepsi ancaman keamanan AS. Indikasinya diperlihatkan dengan upaya gelar pasukan dan alutsista AS di basis militer negara tetangga. Meningkatnya agresivitas dan manuver militer Cina diperkirakan sebagai alasannya. Semua ini memiliki implikasi atas prospek keamanan wilayah Indonesia.

Pendahuluan

Pada minggu kedua Januari 2012, perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di Asia-Pasifik semakin jelas. Hal ini diperlihatkan dengan presentasi mantan Menhan William S. Cohen ke Sekretariat ASEAN, Jakarta, tentang strategi baru keamanan AS dan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan sambil terus dikemukakannya argumen perubahan strategis itu ke depan oleh petinggi AS, seperti oleh Menhan Panetta. Juga, langkah itu sudah diintroduksi dengan kebijakan berikut ini. Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi Darwin, Northern Territory, Australia, dan mengumumkan peningkatan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Di sana telah dideklarasikan rencana penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan

menggunakan barak Robertson. Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Gelar pasukan AS ini melengkapi pangkalan mata-mata *Joint Defence Facility di Pine Gap* dekat Alice Springs.

Pandangan Moderat/Pro

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terusik dengan pengumuman Obama dan penempatan marinir AS di Darwin. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tidak menunjukkan kekhawatiran, dan menilai gelar pasukan itu dibutuhkan untuk operasi darurat penanggulangan bencana alam, yang akan bermanfaat bagi Indonesia dan negara lain di kawasan yang rawan terhadap bencana alam. Menko Polkam

^{*)} Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional, Politik, Keamanan, dan Demokrasi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: pptogin@yahoo.com.

Marsekal (Purn) Joko Suyanto dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak menanggapi itu sebagai hal serius dan ada kaitannya dengan perkembangan kawasan. Wapres Budiono memberikan tanggapan yang sama, tanpa indikasi penentangan. Menurut Wapres, gelar pasukan marinir AS di Darwin tidak perlu menjadi perhatian.

Dilaporkan, sikap kritis muncul dari Menlu Marty Natalegawa yang mengkhawatirkan dampak kebijakan AS itu terhadap perkembangan kawasan. Ia khawatir gelar pasukan marinir AS di Darwin akan menimbulkan reaksi Cina dengan meningkatkan manuver militernya, sehingga menambah ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, dikabarkan terjadi disharmoni antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menlu Natalegawa.

Pandangan Kritis/Kontra

Mereka yang berpandangan kritis/kontra, menilai jangan naif melihat keputusan pemerintah AS. Pengamat militer asing mengatakan keputusan AS dan dukungan Australia atas gelar pasukan marinir AS itu adalah merespons kebangkitan dan agresivitas militer Cina di kawasan dan klaim kedaulatannya atas wilayah perairan Laut Cina Selatan. Militer Cina telah mengirimkan kapal induk untuk memperlihatkan ambisi angkatan lautnya, sehingga membangkitkan kecemasan AS dan Jepang.

Mantan KSAU, Marsekal (Purn) Cheppy Hakim menyatakan sangat naif untuk dapat diterima bahwa gelar pasukan marinir AS yang siap tempur di dekat wilayah Indonesia sangat dibutuhkan untuk membantu operasi kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ini semakin sulit diterima akal sehat jika kekuatan tempur itu didukung kekuatan udara dan senjata canggih untuk operasi militer. Yang patut diingat juga, peran marinir AS yang mempunyai tugas pokok melakukan operasi militer seberang lautan untuk menjaga kepentingan AS di luar wilayah negerinya.

Pandangan yang kontra dan mencurigai gelar pasukan AS di Darwin menandakan telah berubahnya strategi militer AS sejak Perang Dunia II yang mengedepankan pertahanan di garis depan, untuk menghancurkan kekuatan musuh di sarangnya sebelum ia dapat menyerang kepentingan AS di mana-mana. Serangan militer Jepang di Pearl Harbour dalam Perang Dunia II dan aksi terorisme 9/11 dalam era pasca-Perang Dingin telah merubah sikap para pengambil keputusan di AS, terutama kalangan militer. Karena itulah, strategi pertahanan AS ada di luar wilayahnya, sehingga perlu pendirian pangkalan militer dan gelar pasukan, seperti di Jepang dan Korea, selain Guam dan Singapura untuk overhaul dan perawatan kapal-kapal perang yang melayani kepentingan AS di Asia-Pasifik. Di luar itu, terdapat pangkalan militer AS di Eropa dan sekutu-sekutu Arabnya untuk melayani kepentingan AS di Timur-Tengah. Sedangkan gelar pasukan kontiniu dengan mobilitas tinggi dilakukan melalui operasi kapal induk yang memuat pasukan dan senjata tempur militer AS canggih secara masif.

Asia-Pasifik bukan mandala yang kalah pentingnya dibandingkan Eropa dan Timur-Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam beberapa dasawarsa, serta potensi sumber daya alam yang dimilikinya telah membuat kawasan ini semakin dinamis berkembang, apalagi ketika Eropa dilanda krisis berkepanjangan. Terus meningkatnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas militer Cina --negara penggerak utama pertumbuhan di kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengagumkan-- telah membunyikan alarm kewaspadaan bagi pengambil keputusan di angkatan bersenjata AS. Manuver-manuver AL Cina yang kian agresif dan provokatif, terutama dengan peluncuran kapal induknya, memicu respons yang agresif pula dari kekuatan militer AS, khususnya Armada VII. Dapat dikatakan, selain kegiatan diplomasi, Armada VII belakangan disibukkan dengan latihan militer bilateral, misalnya dengan

Korea, Filipina, dan Indonesia, serta multilateral seperti dengan ASEAN.

Peningkatan kekuatan AS di Pasifik mulai dilakukan belakangan ini setelah menyusutnya belanja militer AS sebesar USD487 miliar dan pengurangan gelar pasukan di Eropa dan Timur-Tengah (Afghanistan dan Irak) yang mulai mengalami proses transisi demokratis. Menurunnya belanja militer AS, membuat para pengambil keputusan harus memberikan prioritas tinggi bagi kawasan, di mana kepentingan AS terancam.

Istilah *smart power* dipakai, sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer AS di Asia-Pasifik. Selama ini AS hanya fokus pada penggunaan kekuatan di Eropa dan Timur-Tengah. Ini artinya, penempatan 2.500 pasukan marinir yang seperti tidak banyak itu semestinya dibaca sebagai langkah simbolik AS untuk siap kapan saja menggunakan *smart power* untuk merespons ancaman atas kepentingannya di Asia-Pasifik. Dengan kehadiran pasukan AS, minimal sekutu-sekutu dekatnya, seperti Australia dan Filipina, dan juga Viet Nam, merasa lebih aman. Walaupun simbolik, keputusan itu merefleksikan ketegasan AS untuk mengamankan kawasan—merespons manuver-manuver AL Cina yang kian mengancam beberapa negara *claimants* kecil.

Pengembangan kekuatan militer yang lebih difokuskan di kawasan Asia Pasifik dipicu kekuatiran AS terhadap perkembangan secara drastis kekuatan militer Cina, yang dianggap telah menjadi ancaman bagi dominasi militer AS. Adanya persepsi ancaman ini dapat dihubungkan dengan pernyataan Obama, yang menyatakan bahwa AS akan mempertahankan dominasinya di kawasan Asia-Pasifik.

Namun, peralihan fokus pada mandala tersebut bukan berarti AS tidak siap menghadapi kemungkinan pecahnya perang baru di Timur-Tengah akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Serangan atas Iran oleh AS juga telah diperhitungkan dilakukan dalam rangka menghambat

pertumbuhan ekonomi dan militer Cina yang kian hebat, sebab perang di Selat Hormuz akan menghentikan arus suplai minyak Iran ke Cina, yang akan mengganggu *energy security* dan mengurangi mobilitas kekuatan militer Cina di Asia-Pasifik.

Bagi AS, seperti dikatakan mantan Menhan Cohen, Cina ataupun kekuatan lainnya tidak boleh mendominasi kawasan. Asia-Pasifik telah memberikan pelajaran sejarah tentang kegagalan besar strategi militer AS yang tidak boleh terulang lagi. Karena itu, isu pergeseran kebijakan keamanan AS di Asia-Pasifik akan terus mengindikasikan meningkatnya intensitas diplomasi AS di kawasan.

Obama mengungkapkan bahwa gelar pasukan AS di Australia berguna untuk menjaga konstelasi keamanan di Asia, dan AS ingin memperluas perannya di Asia-Pasifik. Fokus kegiatan militer telah dialihkan dari Irak dan Afghanistan ke Asia, terutama Asia Tenggara. Obama telah memberitahukan Dewan Keamanan Nasional agar misi militer AS di Asia-Pasifik dijadikan prioritas. Ia menjamin, pemotongan anggaran militer tidak akan mengorbankan kawasan ini, karena Asia akan menentukan masa depan dunia. Cina yang menentang setiap konsolidasi dan pengembangan aliansi militer mengatakan kebijakan baru AS itu sebagai manifestasi bertahannya mentalitas Perang Dingin.

Penutup

Sulit menutupi keterkaitan perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik dengan peralihan fokus kebijakan militer AS di kawasan. Peralihan fokus ini tidak hanya dipengaruhi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan, namun juga persepsi kian terancamnya kepentingan AS di Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara yang berdekatan letaknya dengan basis pasukan marinir AS di Darwin. Orang tidak bisa menutup mata bahwa tidak jauh dari situ, di Papua, terdapat perusahaan transnasional (TNC) AS,

Freeport, yang menghasilkan profit tinggi selama bertahun-tahun tetapi terancam kelanjutan usahanya. Kepentingan TNC AS di bisnis pertambangan yang tersebar di wilayah Indonesia lainnya, juga terancam belakangan akibat maraknya sengketa pertambangan.

Sekalipun masalah TNC AS itu merupakan urusan swasta, namun bagi pemerintah AS memberikan perlindungan (keamanan) terhadap setiap warga negara AS di manapun mereka berada merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan mandat konstitusi. Posisi kuat warga negara sebagai pembayar pajak pengontrol peran pemerintah dalam kehidupan demokrasi AS, membuat siapapun Presiden AS akan berupaya melindungi keberadaan warganya yang terancam, apalagi jika usaha mereka menghasilkan devisa yang tidak sedikit buat negaranya. Posisi TNC yang kuat dalam demokrasi pasar AS sebagai kelompok pendukung yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kelompok penekan melalui lobi-lobi politik tingkat atas, menyebabkan Pemerintah Obama, terutama menjelang pemilu baru (2013), sungkan untuk lambat atau lalai mengambil keputusan atas nasib warga dan korporasi mereka yang sangat kuat eksistensi dan pengaruhnya.

Sebelum ini, AS pernah memperlihatkan kekuatiran atas keamanan jalur pelayaran komoditasnya di Selat Malaka. AS juga telah mengusulkan pembukaan jalur perairan internasional baru di wilayah perairan Indonesia, di luar 3 ALKI yang ada. ALKI 3 sendiri merupakan

jalur lintas perairan internasional terdekat dengan kepentingan AS di Pasifik, dan masih perlu ditingkatkan pengamanannya, mengingat Indonesia mempunyai keterbatasan dengan kekuatan lautnya. Padahal, di ALKI 3 tersebar potensi kekayaan alam dan laut Indonesia yang telah mengundang adikuasa masa lalu, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling memperebutkannya. Morotai, wilayah Indonesia yang terletak di bibir Pasifik dan punya hubungan historis dengan AS dalam Perang Dunia II, memegang kunci sebagai batu lompatan ke basis militer AS di Korea, Jepang dan Guam, serta juga Filipina dan Singapura, yang masih memainkan peran sebagai fasilitas pendukung. Dan yang paling signifikan, di kawasan Asia-Pasifik ini terletak pusat pertumbuhan ekonomi dunia masa kini dan mendatang.

Rujukan:

1. "AS Fokus pada Kekuatan Militer Asia," www.kompas.com, diakses 18 November 2011.
2. "AS Perkuat Militernya di Australia Utara," www.vivanews.com, diakses 16 November 2011.
3. "China: Itu Bukti Mentalitas Perang Dingin," www.kompas.com, diakses 30 November 2011.
4. Hakim, Chappy, Marinir Amerika di Australia, *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.
5. William S. Cohen: Ingin Memastikan AS Stabil, *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012.